

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KECAMATAN PANDEGLANG KABUPATEN
PANDEGLANG PROPINSI BANTEN**

Irlon¹, Gemala Nirwana Puri², Hikmah Hidayat³

^{1,3}Program Studi Teknik Informatika STMIK Ganesha
²Program Studi Teknik Informatika Universitas Mitra Karya
Irlon115@hmail.com

Abstrak

UMKM menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi Negara karena UMKM dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi krisis ekonomi dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan UMKM selain faktor faktor lainnya. Cara yang baik dalam pengelolaan dana adalah dengan menerapkan akuntansi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi penerapan proses pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dan pemahaman tentang Standar akuntansi Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola UMKM tidak menerapkan sistem akuntansi dan hanya 9% UMKM yang memahami SAK ETAP serta hanya sebanyak 7% UMKM yang menerapkan sistem akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan lengkap sesuai SAK ETAP Hal ini di karenakan tingkat Pendidikan sebagian besar SMP dan SMA dan kurangnya minat untuk menerapkan system akuntansi serta kurangnya sosialisasi tentang sistem akuntansi dan SAK ETAP dari pemerintah daerah terkait.

Kata Kunci: *sistem akuntansi, UMKM.*

I. PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi Negara karena UMKM dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi krisis ekonomi dan berkontribusi besar terhadap Produk

Domestik Bruto. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Menurut wakil ketua komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta sebanyak 98,7% usaha di Indonesia

merupakan usaha mikro dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 89,17%.

Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019, realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2018 mencapai sekitar 60,34%.

Dilain pihak UMKM banyak menghadapi kendala dalam bidang administrasi keuangan dan pengelolaan dana dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai penerapan akuntansi dalam mengelola bisnisnya. (Kurniawati et al., 2012).

Para pengusaha UMKM juga kurang menyadari betapa pentingnya laporan keuangan bagi usaha yang dijalankan, sehingga pencatatan transaksi hanya sebatas pada transaksi kas keluar dan kas masuk. Faktor lainnya latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola kurang memadai, sehingga kurang memahami akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan usaha. (Adrianto, 2016)

Banyak faktor lain yang menghambat UMKM dalam menerapkan akuntansi dilihat dari segi kemampuan yang meliputi latar belakang pendidikan yang kurang memadai, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi dan dari segi pengelola belum merasa ada kebutuhan penerapan akuntansi.

Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan UMKM selain faktor faktor lainnya. Cara yang baik dalam pengelolaan dana adalah dengan menerapkan akuntansi yang baik. Dengan menerapkan akuntansi yang baik UMKM dapat mengetahui berbagai informasi keuangan dan dapat mengukur kinerja bisnisnya. Penerapan pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku untuk UMKM adalah berdasarkan Standar akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Adanya SAK-ETAP diharapkan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk kegiatan usaha bisnisnya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan Salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

SAK ETAP dapat digunakan oleh UMKM karena sifatnya yang lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan SAK Umum. Hal terpenting dari implementasi SAK ETAP adalah pemahaman yang baik atas SAK ETAP tersebut oleh UMKM tersebut. SAK ETAP bertujuan untuk dapat mengakomodir kebutuhan dari entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Selain itu sejak 24 Oktober 2016 IAI telah mengeluarkan standar akuntansi untuk Entitas Mikro Kecil dan menengah (SAK EMKM) yang lebih sederhana, sehingga sangat

mudah diterapkan oleh pelaku usaha yang dikelompokkan sebagai entitas usaha mikro. Dengan penerapan akuntansi yang memadai yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dapat mempermudah bagi mereka untuk mengukur kinerja usahanya selain itu para pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan peminjaman kredit ke bank.

Kabupaten Pandeglang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa. Kabupaten Pandeglang mempunyai 33 kecamatan salah satunya kecamatan Pandeglang. Potensi perdagangan dan Perindustrian di kabupaten Pandeglang :

- a. Pengembangan Emping Melinjo, yang berlokasi di Kecamatan Menes, Labuan, Jiput dan Pagelaran.
- b. Industri Kerajinan Tangan Patung Badak Kayu, lokasi Kecamatan Sumur dan Cimanggu,
- c. Pengembangan Industri Meubel, lokasi Kecamatan Bojong

Industri makanan dan minuman yang tersebar diseluruh Kabupaten Pandeglang Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Olis Solihin UKM di Pandeglang merupakan potensial

menjadi kekuatan yang akan mampu mendorong perkembangan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Dinas Koperasi dan UMKM terus membina pelaku UMKM sehingga diharapkan bisa lebih berkembang. Pola pembinaan yang dilakukan, meliputi teknis usaha mulai cara pengelolaan dan pengepakan hingga bantuan permodalan. (<https://banten.antaranews.com/berita/21486/bupati-ukm-pandeglang-jangan-harap-bantuan-pemerintah>).

Teknis usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kecamatan Pandeglang telah banyak dilakukan peneliti belum melihat apakah dinas terkait telah melakukan pembinaan pemahaman akuntansi. Karna itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah para pelaku UMKM di kecamatan Pandeglang telah memahami sistem akuntansi dan apakah pemerintah terkait telah melakukan sosialisasi tentang sistem akuntansi di daerah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi penerapan proses pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada UMKM di kecamatan Pandeglang. Sehingga dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaksana menerapkan akuntansi UMKM dalam mengelola usahanya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi eksplanasi yaitu menggambarkan pendekatan deskriptif terhadap penerapan sistem pencatatan akuntansi. Untuk medapat

data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan menyebar kuesioner kepada pemilik atau pengelola UMKM di kecamatan Pandeglang. Metode yang digunakan purposive sampling dengan pengambilan sampel menggunakan convenience sampling.

Dengan n (jumlah sampel) paling sedikit 30 (Supranto, 2009) peneliti menggunakan metode ini karena jumlah populasi UMKM yang tersebar di kecamatan Pandeglang tidak diketahui, metode ini mengacu juga pada penelitian (Kpurugbara et al., 2016) yang menggunakan teknik convenience atau purposive sampling dengan memilih sejumlah sample dari populasi. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Pandeglang pada tahun 2019. Kriteria penentuan sampel adalah UMKM yang tersebar di kecamatan Pandeglang baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) kabupaten Pandeglang tahun 2019 yang bergerak di sektor aneka usaha. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden di kecamatan Pandeglang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut ini diperoleh data demografi responden dari 45 responden UMKM di kecamatan Pandeglang Profil Responden: Umur responden pelaku UMKM rata-rata adalah usia produktif yaitu 41 tahun dengan jenis kelamin mayoritas Laki laki sebanyak 30 orang (66,67) dan 15 orang perempuan (

33,33 %). Mempunyai pengalaman sebelum berwirausaha sendiri sebanyak 28 orang (62,22%), sisanya yaitu yang mencoba langsung berwirausaha sendiri adalah 17 orang (32,22%). Dari segi pendidikan pelaku UMKM kecamatan Pandeglang SMP sebanyak 15 orang (33,33%), SMA sebanyak 24 orang (53,33 %), Diploma sebanyak 1 orang (2,22%) dan sarjana sebanyak 5 orang (11,11%). Dilihat dari tingkat pendidikan para pelaku UMKM adalah mayoritas tamat Sekolah Menengah Atas. Status responden 37 orang (82,22 %) adalah pemilik dan pemodal 8,89 adalah pemilik saja dan 8,88% adalah pengelola/ manajer.

Sistem pembukuan yang dipakai oleh responden adalah 91% masih manual yang menggunakan system dengan software akuntansi hanya ada 3 responden (7%) hal ini dikarenakan 40 (89,89%) responden merupakan pelaku usaha mikro dengan modal kurang dari 50 juta dimana pelaku usaha mikro karena omset usahanya relative kecil sehingga belum merasa perlu system akuntansi dengan menggunakan software, 4 responden merupakan usaha kecil dengan permodalan diatas 50 juta sampai 500 juta. dan 1 responden merupakan usaha menengah dengan permodalan diatas 500 juta sampai 10 milyar.

Peran Pemerintah daerah Sebanyak 51,1% responden mengatakan tidak pernah mengetahui adanya program pemberdayaan UMKM dari pemerintah, sisanya mengatakan kadang kadang ada program pemberdayaan UMKM dari pemerintah. Program pemberdayaan

UMKM yang dianggap paling efektif adalah program pendampingan yaitu responden menyampaikan sebanyak 42,22%

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan atas data yang telah diolah dari 45 pelaku usaha UMKM kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Masih banyak pelaku UMKM di kecamatan Pandeglang belum memahami dan menerapkan system akuntansi. System pencatan yang diterapkan 91% masih secara manual dan masih secara parsial atau sebagian dari system pencatatan akuntansi yang benar. Pelaku UMKM di kecamatan Pandeglang yang telah menerapkan pencatatan paling banyak melakukan pencatatan pembelian 33% dan penerimaan kas 22%. sisanya 7 % adalah menerapkan jurnal pengeluaran kas, 5% jurnal penjualan, 9% jurnal umum dan ada 7% yang menggunakan model pencatatan lainnya. Demikian juga dalam menyajikan laporan keuangan masih banyak yang belum menyajikan secara lengkap laporan keuangan menurut SAK-ETAP hanya ada sekitar 5 atau 11% perusahaan UMKM yang menyajikan laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Sebanyak 91% UMKM di kecamatan Pandeglang belum mengetahui tentang standar akuntansi ETAP, 9% sudah memahami SAK ETAP. Dari 9% tersebut yang menerapkan system akuntansi sesuai dengan standar akuntansi ETAP hanya 7% UMKM atau hanya 3 UMKM dan 3 UMKM

telah menggunakan software accounting.

Hal ini disebabkan karena pelaku usaha UMKM di kecamatan Pandeglang sebagian besar adalah pelaku usaha mikro dengan tingkat pendidikan rata rata SMA dan SMP. Para pelaku UMKM kurang menyadari pentingnya laporan keuangan dalam menjalankan usahanya dan tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Peran pemerintah terkait di kecamatan Pandeglang belum dirasakan oleh pelaku UMKM dalam mensosialisasikan penerapan system akuntansi yang dapat membantu untuk mempermudah UMKM dalam menilai kinerja usahanya dan mempermudah pula dalam mengajukan permodalan ke bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting, Finance and Management Sciences, 7 (1), 1–10.
<https://doi.org/10.6007/ijarafms/v7-i1/2534>
- Adrianto. (2016). *Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*. Majalah Ekonomi _ ISSN No. 1411-9501 _ Vol. XX No.2 Des 2016, XX(2 Des 2016).
- Awosejo, O. ., Kekwaletswe, R, M., Pretorius, P., & Zuva, T. (2013). *The Effect of Accounting Information Systems in Accounting*. International Journal of

- Advanced Computer Research,
1 (2), 21–31.
- Dwi, J. kirana, & Yoyoh, G.
(2019). *Penerapan Laporan
Keuangan Bagi Usaha Mikro
Dan Kecil Di Wilayah Ciracas
Jakarta Timur*. Jurnal
Akuntansi Manajerial. ISSN
(E) Vol4 No 2 Juli-Desember
2019, 4 (2), 38-48.
- Ezeagba, C. (2017). *Financial
Reporting in Small and
Medium Enterprises (SMEs)
in Nigeria. Challenges and
Options*. International Journal
of Academic Research in